

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMITMEN ORGANISASI
TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH NAGARI**
(Studi Empiris pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

Annisa Maharani

BP/NIM : 2016 / 16043076

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNLOGI INFORMASI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
NAGARI

(Studi Empiris Pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar)

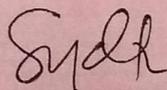
Nama : Annisa Maharani
NIM/TM : 16043076/2016
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2021

Disetujui Oleh :

Mengetahui,

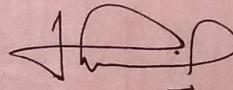
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA. Ph.D

NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Henri Agustin SE, Ak, M.Sc

NIP. 19771123 200312 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari (*Studi Empiris Pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar*)

Nama : Annisa Maharani

NIM/TM : 16043076/2016

Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

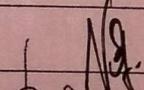
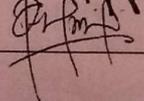
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2021

Tim Penguji:

| No | Jabatan | Nama |
|----|---------|-------------------------------|
| 1 | Ketua | : Henri Agustin, SE, Ak, M.Sc |
| 2 | Anggota | : Vita Fitria Sari, SE, M.Si |
| 3 | Anggota | : Halmawati, SE, M.Si |

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Maharani
Nim/Tahun Masuk : 16043076/2016
Tempat/Tgl Lahir : Padang/16 Desember 1997
Program Studi : S1 Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong Nusa Indah, Nagari Lubuk Jantan,
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar.
No. Hp : 085375759234
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen
Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Nagari (*Studi Empiris pada
Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar*).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh pembimbing, Tim penguji, Dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Maret 2021
Penulis

Annisa Maharani
NIM. 16043076

ABSTRAK

Annisa Maharani (16043076) : **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari (*Studi Empiris pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar*).**

Dosen Pembimbing : Henri Agustin, SE, Ak, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari (studi empiris pada Pemerintah Nagari Kabupaten Tanah Datar). Penelitian ini menggunakan data subjek. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Total Sampling* dengan jumlah sampel 75 nagari. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari.

Kata kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari”. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan ke hadirat Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan teladan terbaik bagi manusia menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selain itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang berguna bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yang selama ini telah memberikan do'a, semangat, serta dorongan demi kelancaran penulisan skripsi ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henri Agustin, SE, Ak, M.Sc selaku pembimbing skripsi yang telah menuntun serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan. Banyak pihak yang berperan dalam proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini, untuk itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA selaku Ketua Jurusan dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Halmawati, SE, M.Si selaku dosen penguji dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku dosen penelaah yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Teristimewa penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Ayahanda Khairil Hendri dan Ibunda Eva Gusnita A.Md Keb, Suami tercinta Anggi Fetra Migaus SE, Nenek tercinta Hj.Nurlismi, dan Adik tercinta Citra Salsabila serta keluarga tercinta yang sangat penulis sayangi dimana telah banyak memberikan do'a dan bantuan moril serta materil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat terbaik Elmiza SE yang sangat berjasa dan setia mendampingi penulis yang selalu menjadi inspirasi, memberikan semangat dan motivasi selama melakukan pengerjaan skripsi. Kevin Wahyu Rizal yang sangat berjasa dan setia mendampingi penulis selama melakukan penelitian

mengelilingi Kabupaten Tanah Datar, Sahabat Kost ku “*Azzora Kos*” Alifia Syarna Salika S.Pd, Manisha Delia Putri. Sahabat “Istri - Istri sholeha (IIS)” Aning Santi Lestari SE, Nurjannah SE, Sonia Oktaviani SE, Chintya Zara Ananda SE, Putri Rahmawati SE, Nike Puspita Sari, Suci Olivia Paramita, Vegayoan Rilian. Sahabat “Istri Sholeha” Elmiza, Fardhila Amani, dan Witta Widiya.

7. Keluargatercinta Akuntansi Kelas C, Ketua tersibuk Ary Syofian, Abriany Vanesha, Alan Sepriadi, Amara Meidiana, Annisa, Elmiza, Anggraini, Anja Suryadi, Asih Pratiwi, Athelin Erika, Aulia Rahmat, Chika Yanda Permata Putri, Dwiky Pramana, Desi Afrizalita, Desni Ramadhani, Destri Andriani, Fardhila Amani, Fitri Herdi, Hesti Eka Pratiwi, Gimeilia Sarma, Iffah Humaira, Nada Pertiwi, Syofyan Yuliantoni, Viny Amelia Arif, Witta Widiya, dan Yuni yang sama-sama berjuang, saling memberikan semangat dan kenangan berharga selama di kelas C yang tidak akan pernah penulis lupakan, semoga sukses untuk kita semua.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan mengharap saran dari pembaca. Harapannya, semoga skripsi ini dapat dijadikan salah satu rujukan/pelajaran dalam penulisan skripsi yang lebih baik lagi.

Padang, Maret 2021

Annisa Maharani

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SURAT PERNYATAAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS | 10 |
| A. Kajian Teori | 10 |
| 1. <i>Agency Theory</i> | 10 |
| 2. <i>Stewardship Theory</i> | 11 |
| 3. Teori Kepatuhan | 12 |
| 4. Laporan Keuangan | 13 |
| 5. Tujuan Pelaporan Keuangan..... | 14 |
| 6. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan | 15 |
| 7. Sumber Daya Manusia | 17 |
| 8. Pemanfaatan Teknologi Informasi..... | 19 |
| 9. Komitmen Organisasi..... | 30 |
| B. Pengembangan Hipotesis | 34 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Desain Penelitian | 42 |
| B. Populasi dan Sampel..... | 42 |
| C. Jenis Data dan Sumber Data | 42 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| E. Jenis dan Pengukuran Variabel | 44 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| 1. Analisis Deskriptif | 44 |
| 2. Reliabilitas | 46 |
| 3. Uji Validitas | 46 |
| 4. Uji Asumsi Klasik | 46 |

| | |
|--|-----------|
| G. Pengujian Hipotesis | 47 |
| 1. Analisis Regresi Linier Berganda..... | 47 |
| 2. Uji F (F-test)..... | 48 |
| 3. Uji t (t-test)..... | 48 |
| 4. Uji Koefisien Determinasi <i>Adjusted R Square</i> | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 50 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 50 |
| B. Demografi Responden | 50 |
| C. Deskripsi Variabel Penelitian..... | 53 |
| D. Statistik Deskriptif..... | 58 |
| E. Uji Validitas dan Realiabilitas Penelitian..... | 59 |
| 1. Uji Validitas | 59 |
| 2. Uji Reliabilitas | 60 |
| F. Uji Asumsi Klasik | 61 |
| 1. Uji Normalitas | 61 |
| 2. Uji Multikolinearitas | 61 |
| 3. Uji Heterokedastisitas | 62 |
| G. Hasil penelitian..... | 63 |
| 1. Analisis Regresi Linear Berganda..... | 63 |
| 2. Uji F (<i>F Test</i>)..... | 65 |
| 3. Uji t (<i>t-test</i>) | 66 |
| 4. Uji Koefisien Determinasi <i>Adjusted R Square</i> | 67 |
| H. Pembahasan..... | 68 |
| 1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari..... | 68 |
| 2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari..... | 71 |
| 3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari..... | 75 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 77 |
| A. KESIMPULAN | 77 |
| B. KETERBATASAN | 77 |
| C. SARAN | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| Lampiran | 84 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner | 50 |
| Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 51 |
| Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 51 |
| Tabel 4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Keahlian (Pendidikan) | 52 |
| Tabel 4.5 Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja | 53 |
| Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan | 54 |
| Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia ... | 55 |
| Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi | 56 |
| Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Komitmen Organisasi..... | 57 |
| Tabel 4.10 Statistik Deskriptif | 58 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas..... | 59 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas | 60 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas | 61 |
| Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas..... | 62 |
| Tabel 4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas..... | 63 |
| Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda | 64 |
| Tabel 4.17 Hasil Uji F | 65 |
| Tabel 4.18 Hasil Uji T | 66 |
| Tabel 4.19 Hasil Uji Determinasi <i>Adjusted R Square</i> | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari 5 siklus yaitu : 1) Perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa; 2) Pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota; 3) Penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan; 4) Pelaporan. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan; 5) Pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Ketepatanwaktuan laporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah, laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi

mereka di masa lalu. Selain dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, laporan keuangan pemerintah daerah juga digunakan sebagai penilaian prestasi kerja pemerintah. Ketepatanwaktuan menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi informasi pelaporan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Yunina dan Wahyuni, 2016).

Ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Apabila penyelesaian penyajian laporan keuangan terlambat atau tidak diperoleh saat di butuhkan, maka relevansi dan manfaat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan akan berkurang (Mamduh, 2003). Ketepatanwaktuan merupakan karakteristik kualitatif penting dari akuntansi dan merupakan elemen mendasar dari relevansi informasi laporan keuangan (Clatworthy dan Peel, 2010).

Wardani dan Andriyani (2017) mengatakan bahwa ada tiga sumber yang mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan yaitu: sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana teknologi informasi yang memadai, dan komitmen organisasi yang baik. Hal pertama yang mempengaruhinya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pengelolaan keuangan nagari yang baik, seorang wali nagari dan perangkat nagari yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan, serta

memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Nurillah, 2014). Sumber daya yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa dipengaruhi berbagai sumber daya dan sarana pendukung. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sembiring, 2013). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004). Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Menurut Jogiyanto (1995) informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatan waktu) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Pemerintah nagari harus bisa

menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan nagari, secara prinsip masih banyak nagari yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan nagari, seperti: 1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari nagari ke kecamatan, 2) masih lemahnya *skill* (keterampilan) terkait pembuatan laporan keuangan atau sumber daya manusia yang kurang mendukung, 3) masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi/internet (Hanifah dan Praptoyo, 2015).

Meihat dari berbagai fakta dan problematika diatas maka pemerintah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan juga salah satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta akuntabilitas. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Tujuan dibuatnya Siskeudes untuk memudahkan pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Perbedaan yang mendasar antara sistem lama/manual dengan sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru (Siskeudes) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah banyak laporan yang muncul, tetapi tetap dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali

(Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017)

Komitmen organisasi sebagai suatu tindakan psikologis dengan karakteristik, meyakini dan menerima tujuan serta nilai yang dimiliki oleh organisasi, kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh demi organisasi dan mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja dengan penuh dedikasi karena menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang penting (Allen *et al*, 1993). Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud apabila diikuti oleh komitmen organisasi yang kuat (Ridha dan basuki, 2012). Semakin seorang staf pelaporan keuangan memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan (Luthans, 2006).

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins dan Judge, 2008). Komitmen organisasi menunjuk pada pengidentifikasian tujuan karyawan dengan tujuan organisasi, kemauan untuk mengerahkan segala upaya kepentingan organisasi dan keterikatan untuk tetap menjadi bagian organisasi (Mowday, 1979). Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh.

Dari hasil pemaparan diatas beberapa peneliti terdahulu sudah meneliti adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya yang menjadi *research gap* dari penelitian ini yaitu hasil penelitian Sembiring (2013) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem

pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan. Hasil penelitian Eristanti dkk (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan hasil penelitian Rosalind dan Kawedar (2011) yaitu kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen. Febriady (2013) dan Marlinawati (2018) menggunakan sistem pengendalian intern sebagai variabel independennya. Eristanti (2019) menggunakan variabel independen sistem akuntansi keuangan. Sedangkan peneliti menggunakan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi sebagai variabel independen. Kartika (2017) dan Prasetyo (2013) menggunakan variabel dependen yaitu keterandalan. Sedangkan peneliti menggunakan ketepatanwaktuan sebagai variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dalam penyajian laporan keuangan harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan ketepatanwaktuan dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus tepat waktu sehingga bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Nagari yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti mengambil judul : **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Nagari (*Studi Empiris pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Nagari ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Nagari ?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Nagari ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Nagari.
2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Nagari.
3. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
Dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Nagari.

2. Bagi Pemerintah Nagari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mempertimbangkan penerapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi dalam pelaporan keuangan pemerintah nagari guna menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Agency Theory*

Teori Utama yang mendasari penelitian ini adalah teori *agency* yang menjelaskan hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat (Jensen dan Meckling, 1976). Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan pada organisasi sektor publik. Hubungan keagenan dalam sektor publik ditunjukkan dimana rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agen*.

Pemerintah memiliki kewajiban sebagai akuntabilitas publik untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan laporan keuangan atas segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2009). Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah dapat melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Adanya laporan keuangan, maka rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Prayitno, 2012). Apabila kinerja pemerintah baik, maka rakyat akan mempercayai pemerintah.

Agent berkepentingan dalam memaksimalkan keuntungan *principal*, namun *agent* juga berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri,

sehingga ada kecenderungan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan *principal* (Aminah, et al., 2019). Meisser, et al., (2006), hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya asimetris informasi (*information asymmetry*), dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Terdapat dua macam masalah agensi (Jensen dan Mecling, 1976), yaitu:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan terjadi jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse Selection*, yaitu situasi dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh *agent* sudah sesuai dengan informasi yang sebenarnya.

2. *Stewardship Theory*

Stewardship theory yaitu teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu melainkan untuk kepentingan organisasi (Donalson, 1991). Akuntansi sektor publik sejak awal perkembangannya telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menghubungkan antara *stewards* dan *principals*. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai suatu organisasi non profit yang bertujuan untuk mencapai *good corporate governance*.

Bentuk usaha pemerintah dalam pencapaian kinerja keuangan yang baik harus berdasarkan prinsip *stewardship* yaitu pemerintah sebagai pelayanan publik non profit. Pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan sehingga tujuan

ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara maksimal. Pelaksanaan tanggungjawab oleh *Steward* dengan menggunakan kemampuan dan keahlian untuk mengefektifitaskan pengendalian intern agar menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.

3. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Faristina, (2011), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005 dalam Faristiana, 2011).

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi kepatuhan entitas

pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Faristina, 2011).

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi Terhadap anggarannya;

- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

5. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

6. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

a. Pengertian Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Ketepatanwaktuan adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedia informasi ditangan pemakai atau pengguna. Ketepatanwaktuan menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatanwaktuan juga menunjukan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka (Amey, Gordon dan Narayanan) dalam Respati (2001).

Ketepatanwaktuan menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi informasi pelaporan. Apabila informasi disampaikan dalam waktu lama maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Soeprihatinningsih, 2017). Menurut Permendagri No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa

Laporan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

b. Arti Penting Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Respati (2001) menyatakan bahwa ketepatanwaktuan menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan pemerintah yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Sehingga dapat mendukung pemerintah menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka. Mamduh (2003) menyatakan bahwa ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Apabila penyelesaian penyajian laporan keuangan terlambat atau tidak diperoleh saat di butuhkan, maka relevansi dan manfaat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan akan berkurang.

Menurut Jogiyanto (1995) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Menurut Jogiyanto (1995) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan

informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif (Widjajanto, 2001).

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16): masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui : a) adanya pemberian informasi terhadap indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah ataupun DPRD, b) penyampaian pendapat dan saran oleh masyarakat mengenai perbaikan kepada pemerintah. Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

7. Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Widodo (2001) dalam Suwanda (2015), kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Pegawai yang memiliki pemahaman yang

rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan.

b. Arti Penting Sumber Daya Manusia

Menurut Sembiring (2013) salah satu elemen organisasi yang sangat penting adalah sumber daya manusia karena pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan elemen utama suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintahan seperti perubahan-perubahan lingkungan bisnis, lingkungan kerja, menghendaki perusahaan/organisasi harus melakukan pengembangan sumber daya manusia secara pro aktif sehingga tidak terjadi keusangan kemampuan pegawai dan juga untuk meningkatkan produktifitas. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

c. Indikator Sumber Daya Manusia

Menurut M. Dawan Rahardjo (2010) mengatakan bahwa indikator dari kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan) meliputi:
 - a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.
 - b. Memiliki pengetahuan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
2. Pendidikan
 - a. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
 - b. Memiliki tingkat ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja baik yang ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Zuliarti, 2012). Menurut Jogiyanto (1995) dalam Fadila (2013) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Yosefrinaldi (2013) mengatakan bahwa semakin besar pemanfaatan teknologi

informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan (Darmini & Putra, 2006). Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014).

Sedangkan menurut Widjajanto (2001) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/APBD dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit.

b. Dasar Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi di Organisasi

Pemerintah Daerah

Undang-undang RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/menyebarkan informasi. Sedangkan pemanfaatan teknologi

informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai. (Larasati, 2017).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 pasal 13 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a) penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah.
- c) penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional. Pasal 14 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Sedangkan menurut Widjanto dalam Sembiring (2013) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi

akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Pujonggo, 2004).

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et al.* (1991) dalam Tjhai (2003) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Menurut model yang dikembangkan Thompson *et al.* (1991) dalam Astuti dan I ketut (2009), beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi :

1. Faktor sosial

Faktor sosial diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan teknologi informasi. Faktor sosial ditunjukkan dari besarnya dukungan rekan kerja, atasan, dan organisasi. Menurut Triandis (1980) dalam Tjhai (2003:7) faktor sosial memiliki hubungan positif dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika mendapat dukungan dari individu lainnya.

2. *Affect* (perasaan individu)

Perasaan individu dapat diartikan bagaimana perasaan individu, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi. Agus (2006) membuktikan bahwa perasaan individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi system informasi. Hal ini berarti jika individu senang melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi, maka individu tersebut akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

3. Kesesuaian tugas

Kesesuaian tugas dengan teknologi informasi secara lebih spesifik menunjukkan hubungan pemanfaatan teknologi dengan kebutuhan tugas. Tugas diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dalam memproses *input* menjadi *output*. Karakteristik tugas mencerminkan sifat dan jenis tugas yang memerlukan bantuan teknologi. Thompson *et al.* (1991) dalam Tjhai (2003:18) memperoleh hubungan yang positif dan signifikan antara kesesuaian tugas dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan

bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika teknologi informasi yang diterapkan sesuai dengan tugas mereka.

4. Konsekuensi jangka panjang

Konsekuensi jangka panjang dapat diukur dari *output* yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan pada masa yang akan datang, seperti peningkatan karir dan peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting. Untuk beberapa individu, motivasi untuk menggunakan teknologi informasi dapat dihubungkan dengan rencana pada masa yang akan datang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini. Beatty (1986) dalam Tjhai (2003:9) menemukan hubungan positif antara konsekuensi jangka panjang dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika *output* yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan pada masa yang akan datang seperti peningkatan karir dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting.

5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi

Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektifitas yang ada di lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan Schultz dkk. (1975) dalam Tjhai (2003:9) membuktikan bahwa kondisi yang mendukung penggunaan teknologi informasi atau dukungan untuk penggunaan

teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi.

6. Kompleksitas

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang di persepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan (Jugianto, 2008). Penelitian yang dilakukan Tornatzky dkk. (1982) dalam Tjhai (2003:8) menemukan bahwa semakin kompleks inovasi yang dilakukan semakin rendah tingkat penerimaan. Jika pemanfaatan teknologi informasi dapat ditunjukkan dalam konteks penerimaan atas inovasi, maka hasil ini mendukung sebuah hubungan yang negatif antara kompleksitas dengan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini didukung oleh penelitian Thompson *et al.* (1991) dalam Tjhai (2003:18) dan Agus (2006) yang memperoleh hasil bahwa kompleksitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kompleks teknologi informasi maka semakin rendah tingkat pemanfaatan teknologi informasi.

d. Manfaat Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam akuntansi menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini pula menjadi perhatian:

- 1) Bagian akuntansi atau keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja

- 3) Jaringan computer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

e. Teknologi Informasi yang digunakan dalam Organisasi Pemerintah

Daerah

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe*, *mini*, *micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet*, *intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010):

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi informasi yang digunakan pada pemerintah daerah yaitu adanya aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah

daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Simda terdiri dari 67 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di Nagari, dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh wali nagari untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. Simda merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

Menurut Djaja dalam (Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013), Aplikasi Simda merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi Simda dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi Simda untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Namun secara teknis beberapa kendala yang masih dihadapi oleh sebagian organisasi pemerintah daerah ialah :

- a. Belum adanya dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran/arus data sejak data mentah sampai dengan

informasi tercetak. Persoalan ini kelihatannya sederhana, tetapi terkadang bias menyulitkan pihak manajer dalam mengawasi arus informasi yang terdapat dalam organisasi yang dipimpinnya.

- b. Lemahnya *Data Management Systems*. Ini terbukti dari belum adanya standar operasi yang baku, munculnya eksekusi *overflow reporting*, *redundancy* yang tidak efisien dan sebagainya.
- c. Prosedur untuk melihat data secara incidental masih terlalu lama, ini disebabkan karena banyak Kantor PDE yang tidak menggunakan system database relasional yang lebih efisien sehingga *direct access* sulit dilakukan.
- d. Tata ruang perkantoran masih kurang memadai. Ruang untuk kegiatan-kegiatan ketatausahaan (tulis-menulis), operasi computer, atau penyortiran data masih bercampur-baur sehingga pekerjaan menjadi kurang sistematis.
- e. Untuk perawatan mesin atau perangkat keras, organisasi masih menggantungkan diri kepada pihak pemasok dengan *system* kontrak pertahun. Akibatnya kalau ada kerusakan-kerusakan teknis, sekalipun sangat sederhana, tidak bisa segera diatasi sendiri oleh para pegawai.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya ialah kurang lancarnya pemasukan data. Proses *data entry* sangat menentukan kelangsungan proses-proses pengolahan berikutnya. Apabila sejak awal pengisian data tidak lancar dan tidak akurat, maka pekerjaan untuk mengoreksi data akan bertambah panjang, *data sorting* akan lamban, dan akhirnya tujuan organisasi PDE untuk menghasilkan informasi tepat pada waktunya tidak akan tercapai.

Pengembangan Aplikasi Simda-Desa (Sistem Tata Kelola Keuangan

Desa) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peluncuran aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi APBDes semua nagari. Diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk memudahkan pemerintah desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa dan pelaporan keuangan desa.

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Tujuan dibuatnya Siskeudes untuk memudahkan pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan,

dan evaluasi RAPBDes. Begitu data dimasukkan, Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data. Selain itu, perubahan aktivitas atau anggaran secara ilegal dapat dilacak dan dicegah oleh Siskeudes.

f. Tingkat Integrasi Teknologi Informasi

Integrasi adalah merupakan suatu upaya untuk melakukan penggabungan dua atau lebih elemen guna menghasilkan inovasi baru. Dengan kata lain bahwa mengintegrasikan teknologi informasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas dengan menggunakan strategi baru (Yaumi, 2011).

9. Komitmen Organisasi

a. Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Mowday *et al*, 1979). Menurut Allen *et al*. (1993), pegawai yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja dengan penuh dedikasi karena menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang penting. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi juga memiliki pandangan yang positif dan akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi, hal ini membuat pegawai memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab lebih demi keberhasilan organisasi. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk

menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi akan dapat mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP (Modo *et al*, 2016).

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Weiner dalam Coryanata, 2004). Mathis dan Jackson (dalam Sopiah) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Menurut Soekidjan (2009), pengertian Komitmen Organisasi adalah sebagai berikut: “Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi” (Soekidjan 2009).

Seseorang yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja manajerial mapupun organisasi yang tinggi, tingkat absensi berkurang, dan meningkatnya loyalitas karyawan pada organisasi (Sopiah, 2008:166) dalam Arfan (2014). Disamping itu, komitmen organisasional dapat menjadi alat bantu psikologi dalam menjalankan organisasi untuk mencapai kinerja manajerial yang diharapkan. Pegawai pemerintah yang berkomitmen akan bekerja semaksimal mungkin karena mereka menginginkan kesuksesan organisasi pemerintah daerah tempat mereka bekerja dan juga menunjang kinerja manajerial yang mereka terapkan.

b. Indikator Komitmen Organisasi

Terkadang kita tidak menyadari bahwa komitmen itu bukan hanya perasaan loyalitas yang pasif. Seseorang bisa memiliki perasaan aktif terhadap hubungan dirinya dengan organisasi yang memiliki tujuan bersama. Menurut Lincoln dan Bashaw (dalam Sopiah, 2008) komitmen organisasi memiliki tiga indikator yaitu:

- a. Kemauan karyawan, dimana adanya keinginan karyawan untuk mengusahakan agar tercapainya kepentingan organisasi.
- b. Kesetiaan karyawan, yang mana karyawan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya untuk terus menjadi salah satu bagian dari organisasi.
- c. Kebanggaan karyawan, ditandai dengan karyawan merasa bangga telah menjadi bagian dari organisasi yang diikutinya dan merasa bahwa organisasi tersebut telah menjadi bagian dalam hidupnya.

c. Faktor Penyebab Komitmen Organisasi

Komitmen dalam organisasi tidak terjadi begitu saja dengan sangat mudah dan cepat. Melainkan mengalami proses yang bertahap dan cukup panjang. Menurut Steers (dalam Sopiah, 2008) menyatakan tiga faktor yang mempengaruhi komitmen seorang karyawan yaitu:

- a. Ciri pribadi, pekerja termasuk jabatannya dalam organisasi, dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari setiap karyawan.
- b. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan kerja.

c. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan cara-cara pekerja lain dalam mengutarakan dan membicarakan perasaannya tentang organisasi.

Sedangkan menurut Minner (dalam Sopiah, 2008) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan antara lain :

1. Faktor personal, hal ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan kepribadian, dan lain sebagainya.
2. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkungan jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan.
3. Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi, kehadiran serikat pekerjaan, dan tingkat pengendalian yang dilakukan terhadap karyawan.
4. Pengalaman kerja, hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan dalam organisasi. Sebab tingkat komitmen antara karyawan yang memang sudah puluhan tahun bekerja akan berbeda dengan karyawan yang baru saja bekerja.

Menurut Steer dan Porter (dalam Sopiah, 2008) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi yaitu :

- a. Faktor personal meliputi *job expectation*, *psychological contract*, *job choice factor*, dan karakteristik personal (kepribadian). Sebab keseluruhan faktor ini akan membentuk komitmen awal.

b. Faktor organisasi, meliputi *initial works experience, job scope, supervision, goal consistency organizational*. Semua faktor ini akan memunculkan dan membentuk tanggung jawab.

c. *Non-organizational factors*, yang meliputi *avalibleity of alternative jobs*. Faktor yang bukan berasal dari dalam organisasi, misalkan ada tidaknya alternatif pekerjaan lain. Jika ada yang lebih baik maka karyawan akan meninggalkannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah:

1. Faktor personal, yang salah satunya merupakan faktor kepribadian sebagai pondasi komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan.
2. Faktor organisasi, ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan kerja dan lain sebagainya.
3. Faktor yang bukan bersal dari organisasi, seperti tidak adanya tawaran pekerjaan yang jauh lebih baik atau gaji yang lebih rendah dari organisasi.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Sumber daya yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan

laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Menurut *Stewardship Theory* menyatakan bahwa para eksekutif cenderung akan termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu peran kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan desa (Atikah, 2019).

Hasil penelitian Indriasari (2008) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketika seseorang memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya maka ia akan menyelesaikan pekerjaan/tugasnya dengan baik dan lebih cepat. Hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan (Ariesta, 2013). Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan

dengan cepat dan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembirng, 2013).

Penelitian Lismawati (2011) menemukan kemampuan sumber daya berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari sumber daya manusia atau pegawai dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Nihayah (2015) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₁ : Kualitas Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Sistem akuntansi di pemerintah daerah maupun desa sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks (Ariesta, 2013). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan (Ariesta, 2013).

Lane (2003) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan pada organisasi sektor publik. Hubungan keagenan dalam sektor publik ditunjukkan dimana rakyat sebagai principal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah memiliki kewajiban sebagai akuntabilitas publik untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan laporan keuangan atas segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2009). Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah dapat melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Adanya pemanfaatan teknologi informasi, maka akan membantu para pegawai dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Faristina, 2011).

Aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi APBDes semua nagari. Diterapkannya

sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk memudahkan pemerintah desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa dan pelaporan keuangan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013) memberikan temuan empiris bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Sembiring (2013) sesuai dengan hasil penelitian Nihayah (2015) Arista (2013) dan Safitri (2016) yang menemukan hal yang sama, akan tetapi hasil penelitian Prpto (2010) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Cohen *et al.* (2007) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di kotamadya-kotamadya Yunani merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan organisasional. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Hasil penelitian (Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017) menyatakan bahwa manfaat dari adanya sistem keuangan desa (Siskeudes) cukup signifikan dirasakan bagi para pegawai desa. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) tersebut telah membantu kerja para pegawai, dimana pekerjaan yang dilakukan dapat lebih terencana dan terarah sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu para pegawai dapat mengetahui kesalahan yang mereka lakukan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari.

3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Mowday *et al*, 1979). Menurut Allen *et al*. (1993), pegawai yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja dengan penuh dedikasi karena menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang penting. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi juga memiliki pandangan yang positif dan akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi, hal ini membuat pegawai memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab lebih demi keberhasilan organisasi. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relative lebih tepat. Dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi akan dapat mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP (Modo *et al*, 2016).

Stewardship Theory mengargumentasikan bahwa untuk kepentingan organisasi manajemen termotivasi untuk lebih fokus pada sasaran utama dari pada tujuan-tujuan individu. Luthans (2006) menyatakan bahwa keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi merupakan komitmen organisasi. Lebih lanjut Jaros (2007) mengungkapkan komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, studi Luthans (2006) menyatakan bahwa semakin seorang staf pelaporan keuangan memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian Rosalind dan Kawedar (2011) dan Rahcmawati (2014) menghasilkan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Hasil penelitian Eristansi dkk (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Barat.

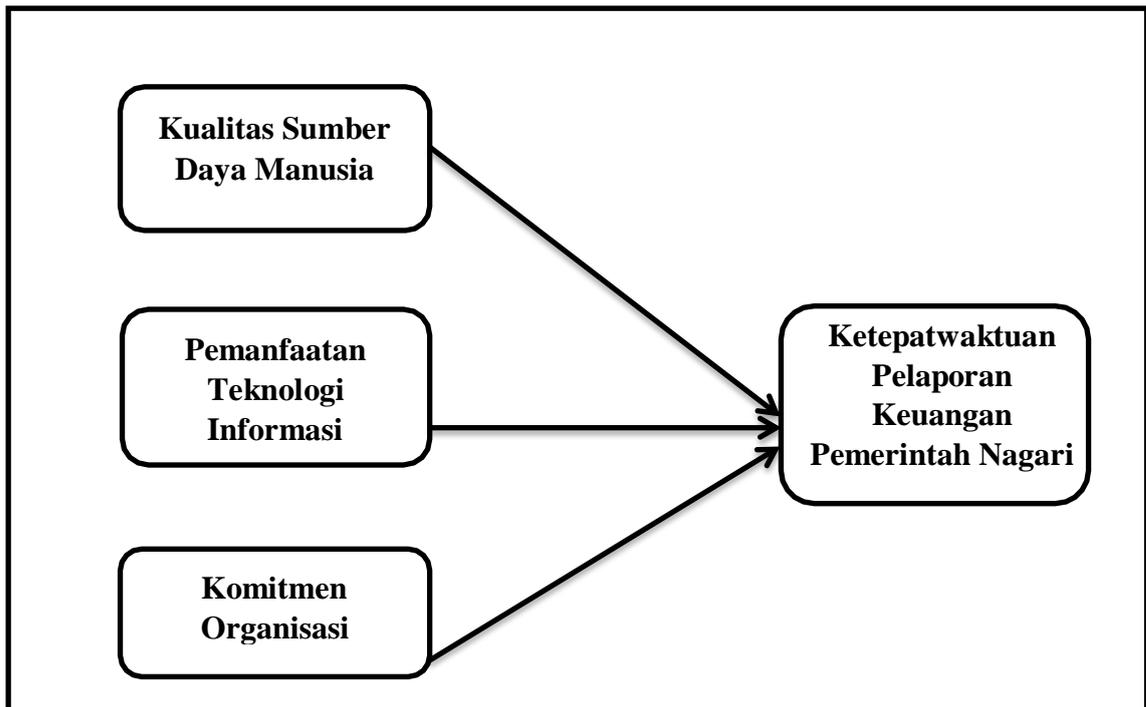
Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara komitmen organisasi dengan keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

H3 : Komitmen organisai berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah nagari.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang penelitian yang akan dilakukan penulis secara keseluruhan, yaitu menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari model berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Dimana semakin baik kualitas sumber daya manusia maka semakin baik pula ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari.
2. Pemanfaatan teknologi informasi positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Dimana semakin baik pemanfaatan Teknologi Informasi semakin baik pula ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari.
3. Komitmen organisasi positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Dimana semakin baik komitmen organisasi maka semakin baik pula ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari.

B. KETERBATASAN

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Penggunaan kuesioner tersebut dapat mengakibatkan respon yang bias dari responden akibat ketidakseriusan dan ketidakjujuran responden terhadap apa yang dirasakan dalam menjawab pertanyaan kuesioner. Sedikitnya jumlah responden yang diperoleh mengurangi derajat keterwakilan pegawai pemerintah nagari.
2. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji *Adjusted R²* adalah sebesar 0,175% atau sebesar 17,5% variabel ketepatanwaktuan pelaporan keuangan nagari dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya (100% - 17,5%) 82,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

C. SARAN

1. Bagi instansi pemerintah diharapkan agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan nagari dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan adanya komitmen organisasi yang memadai, sehingga diharapkan pihak pengelola keuangan nagari khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik agar pelaporan keuangan pemerintah nagari yang tepat waktu sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya pengamatan dilakukan langsung pada objek penelitian untuk menghindari terjadinya respon bias akibat dari penggunaan kuesioner. Sebaiknya dilengkapi dengan wawancara agar

partisipasi responden lebih tinggi dan mendapatkan informasi yang lebih akurat serta dipercayai kebenarannya. Melakukan penambahan sampel penelitian agar dapat memaksimalkan keterwakilan dari pegawai pemerintah nagari secara menyeluruh.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang mampu mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah nagari seperti : gaya kepemimpinan wali nagari, tingkat pendidikan, integritas, objektivitas, dan tingkat profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Sandra, R., & ArastyoAndono, F. (2004). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah daerah "XYZ" dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*.
- Arista, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Aritonang, & F.S. (2009). Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi*.
- Astrawan, K. P., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Atikah, A. (2019). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas laporan Keuangan Desa. *Skripsi Universitas jember*.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cohen, S. (2007). Assessing It As A Key Success Factor For Accrual Accounting Implementation In Greek Municipalities. *Journal of Financial Accountability & Management*.
- Daniri, M. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Darmini, A. A., & Putra, I. N. (2006). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Pada Kinerja Individual Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Eristanti, B. D., & Putra, I. N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*.
- Eristanti, B., & Ardana, I. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*.
- Fadila, A. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Harifan, H. (2009). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Havesi, G. A. (2005). Standards For Internal Control In New York State Government. www.osc.state.ny.us.
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwktuan pelaporan keuangan Pemerintah daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XI di Pontianak*.
- Jasen, M., & W, M. (1976). Theory of the Firm: Manegerial Behavior, Agency and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*.
- Jogiyanto. (2008). *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Kartika, & Safitri, H. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol 15 No 2*.
- Larasati, P. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Lismawati. (2011). Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang Banten*.
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan Edisi Ke Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- M.Dawan, R. (2010). *Intelektual, intelegasi, dan Perilaku Politik dan Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Mahmudi. (1997). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Terakayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Momuat, C. P. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap ketepatan Waktu pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal EMBA*.
- Mutiana, Liza, Diantimala, Y., & Z. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan . *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.

- N.J, A., & Meyer, J. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization. *Journal of Occupational Psychology*.
- Nihayah, A. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPPKAD Eks Keresidenan Pati). *Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prapto, S. (2010). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Sebelas Maret*.
- Primayana, Atmadja, & Darmawan. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Program S1*.
- Respati, N. W. (2001). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Robbins, P., Stephen, & A.Judge, T. (2008). *Perilaku Organisasi Edisi Ke-12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosalin, F. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU di Kota Semarang). *Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang*.
- Rosalin, Faristina, & Kawedar, W. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU di Kota Semarang)*. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/29439/1/jurnal.pdf>.

- Sembiring, F. L. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal, Universitas Negeri Padang* .
- Soekidjan. (2009). *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Bumi Agsara.
- SP, R., & Judge. (2008). *Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirman, Sularso, & Nugraheni. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dengan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman*.
- Sulina, I. G., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganेशha*.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga*. Yogyakarta. BPFÉ.
- Wahyono, T. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi: Analisa, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widjajanto, N. (2001). *sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Winidyaningrum, C., & Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.
- Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) . *Skripsi, Universitas Negeri Padang*.
- Zetra. (2009). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta*.
- Zuliarti. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi, Universitas Muria Kudus*.